

Separatist Conflict In Indonesia
The Long-Distance Politics Of The Acehnese Diaspora
(Gambaran Tentang Konflik Sparatis di Indonesia; Politik Jarak
Jauh Diaspora Aceh)

Abdul Haris Rasyidi
STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
abdulharisrasyidi30@gmail.com

Abstract: This paper departs from a review and review of a book entitled "An overview of the conflict of separatists in Indonesia; the politics of the Aceh diaspora ". In this discussion, what needs to be addressed is the need to look deeply at the movements of the diaspora in supporting the movements and struggles of the Acehnese people. This fact, then illustrates that the aspirations in several countries such as Europe, Australia and Malaysia are actually involved in mobilizing international support during the struggle against the Indonesian security forces and then actively encouraging peaceful settlement. Given that networks of Acehnese diaspora communities abroad have been built solidly, it is interesting to explore more about their role in maintaining peace during the conflict. As we can follow in each chapter of this book, it appears that Antje Missbach has succeeded in doing her job well. This fact is then the right basis to lead us to a more comprehensive understanding of the transformation of the conflict in Aceh which lasted for approximately three decades and a peaceful settlement marked by the signing of the MOU in Helsinki on August 15, 2005. Furthermore, the method used in this paper is literature, especially in a book entitled "separatist conflict in Indonesia the long-distance politics of the acehnese diaspora". Finally, this paper is expected, can lead readers to understand that the need for social science research and of course the treasures of science.

Keywords: Politics, long distance, anticipated

Pendahuluan

Asal muasal politik adalah dari kata *polis*, yang merujuk pada pengertian Negara kota (*city state*) atau masyarakat yang terorganisasi (*organized community*) pada zaman klasik Yunani. Kesatuan politik di Yunani pada waktu itu memang terpusat pada polis-polis yang jumlahnya banyak. Akan tetapi polis yang terkenal di antaranya adalah Athena, Sparta, Troya, dan Thebe. Masing-masing polis mempunyai struktur masyarakat atau pemerintahan sendiri yang mandiri dan merdeka, sehingga antar polis sering terjadi persaingan dan bahkan peperangan. Namun, jika ada bahaya dari luar negeri seperti serbuan dari Persia, maka polis-polis itu akan bersatu untuk menahan serbuan musuh dari luar.¹

Aristoteles menulis buku berjudul *politica*, yang menekankan pada kenyataan atau fakta empiris. Ketika mengamati kehidupan orang Yunani yang terpusat di polis, Aristoteles menarik benang merah bahwa manusia pada dasarnya merupakan “binatang politik atau makhluk sosial” (*zoon politicon*). Satu-satunya cara untuk memaksimalkan kemampuan individu dan untuk meraih bentuk kehidupan yang tertinggi adalah melalui interaksi politik

dengan orang lain dalam kerangka kelembagaan.²

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, setiap individu atau perorangan yang bergelut dalam sebuah dinamika perkembangan politik, baik yang bersifat individu maupun dalam ranah organisasi yang besar akan memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sikap dan pola pikir.

Studi politik diaspora Aceh ini adalah merupakan gambaran dari peran kaum diaspora (diasporan) Aceh yang tersebar diberbagai tempat di Eropa, Australia, Skandinavia, Amerika dan Malaysia ini mencoba memberikan justifikasi empiris bagi pemahaman Wittgenstein bahwa *transnasionalisme* dan diaspora seharusnya lebih mendapat tempat dalam penelitian ilmu sosial, terutama dengan melihat peran dan fungsi kaum diaspora dalam mendorong sebuah proses perubahan.³ Dalam buku ini Antje Missbach secara jeli melihat keberadaan komunitas diaspora Aceh di mancanegara ternyata ikut berperan dalam menggalang dukungan internasional bagi

²*Ibid.*, 161.

³Antje Missbach, *Separatist Conflict in Indonesia the Long-Distance Politics of the Acehnese Diaspora (Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh)*, Terj. Windu Wahyudi Yusuf, (Yogyakarta: Ombak 2012), xiii.

¹ Lihat Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Ombak: Yogyakarta, 2012), 5.

perjuangan rakyat Aceh dan juga dalam proses penegakan perdamaian.⁴

Dalam konteks perdamaian di tanah Aceh, Missbach secara simpatik menyatakan bahwa walaupun perlawanan rakyat Aceh dapat terus berlangsung hingga tiga dasawarsa tidak lepas dari peran komunitas diaspora Aceh dalam menggalang dukungan masyarakat internasional, tetapi tidak kalah pentingnya untuk mengamati bagaimana peran komunitas diaspora ini mendorong terciptanya penyelesaian secara damai.⁵ Dengan demikian untuk lebih memaksimalkan pengkajian peran kaum diaspora Aceh ini tidak berlebihan juga apabila penulis akan mengkaji dan melihat lebih dalam lagi kajian diaspora Aceh dan kontribusinya terhadap ilmu kajian Islam dan penelitian ilmu sosial.

Sekilas Tentang Buku Dan Penulis

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan awal di atas, buku ini berjudul “*Separatist Conflict in Indonesia the Long-Distance Politics of the Acehnese Diaspora*” Penulis adalah Antje Missbach seorang pakar Penelitian ilmu sosial. Tebal buku sekitar ± 361 halaman. Buku ini merupakan hasil riset mendalam Antje Missbach dalam rangka pembuatan disertasi doctoral. Riset tersebut bertujuan untuk mengisi beberapa celah dalam penelitian tentang perjuangan rakyat

Aceh.⁶*Pertama*, perlunya meluruskan persepsi yang kurang tepat bahwa GAM adalah satu-satunya representasi perjuangan rakyat aceh di dalam dan luar negeri. *Kedua*, kenyataan bahwa komunitas diaspora aceh di berbagai tempat di Eropa, Australia dan Malaysia telah ikut andil dalam menggalang dukungan internasional selama perjuangan melawan aparat keamanan Indonesia dan kemudian secara aktif mendorong penyelesaian secara damai adalah hal yang tidak dapat diabaikan.

Ketiga, mengingat bahwa jejaring komunitas diaspora Aceh di luar negeri telah terbangun dengan solid, maka menarik untuk menyimak peran mereka dalam menjaga perdamaian pada masa pascakonflik.⁷

Sejauh ini belum ada riset yang membahas secara khusus peran kelompok diaspora dalam konteks *peace building* (penegakan perdamaian pasca konflik). Sebagaimana dapat kita ikuti di setiap bab buku ini, tampak bahwa Antje Missbach telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Ketiga poin di atas merupakan landasan yang tepat untuk mengantarkan kita pada pemahaman lebih *konfrehensif* dan menyeluruh mengenai transformasi konflik di Aceh yang berlangsung selama kurang lebih tiga dekade dan penyelesaian secara damai yang ditandai dengan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, xiv.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*, xiv.

penandatanganan MOU di Helsinki pada 15 Agustus 2005.⁸

Antje Missbach mempelajari antropologi dan kajian asia tenggara Humboldt-University di Berlin dan ilmu politik di Australian National university di Canberra. Saat ini dia bekerja sebagai peneliti di Melbourne University. Dia sangat tertarik pada perkembangan politik di Aceh, khususnya masa perang dan pascakonflik. Selain itu, dia juga tertarik pada isu-isu lain, misalnya migrasi, penyelundupan manusia dan konflik daerah. Dia pernah tinggal di Indonesia dan masih sering bepergian ke sana untuk penelitiannya.⁹

Ringkasan Isi Buku

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, salah satu tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantah persepsi umum yang kurang tepat bahwa GAM merupakan representasi perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintah Republik Indonesia. bagian ini mencoba mengulas sejarah perlawanan rakyat Aceh yang kemudian membentuk persepsi bahwa konflik Aceh merupakan manifestasi pertempuran antara GAM dan aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polri).¹⁰

Provinsi Aceh, yang memiliki populasi kurang lebih 4,4 juta jiwa, adalah

salah satu propinsi wilayah Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang relatif melimpah, terutama kekayaan yang berupa minyak bumi dan gas alam. Provinsi ini telah dikenal sebagai wilayah dimana Belanda tidak pernah memiliki control secara penuh pada masa penjajahan. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh para kaum ulama telah membuat wilayah ini mempertahankan identitasnya. Sebagai kaum muslim yang setia, masyarakat Aceh memiliki kebanggaan diri sebagai “serambi Mekkah”. Seorang orientalis Belanda yang terkenal, Snouck Hurgronje, memastikan pengertian ini dengan melihat Aceh sebagai pintu ke jazirah Arab bagi para pelaksana ibadah haji dari seluruh kepulauan pada abad kesembilan belas dan ketujuh belas. Hal ini mengindikasikan kehebatan Aceh pada masa itu.¹¹

Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, diantara eksplorasi minyak dan gas secara intensif oleh pemerintah Indonesia di provinsi Aceh, pemberontakan dari GAM cenderung meningkat. Hal ini membawa pemerintah untuk menetapkan Aceh sebagai DOM (daerah operasi militer) di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan taktik-taktik brutal (pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan sebagainya), untuk meneror pejuang GAM dan para

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, 362.

¹⁰*Ibid.*, xv.

¹¹*Ibid.*

simpatisannya. Pendekatan garis keras ini memberikan beberapa akibat. *Pertama*, terdapat perkembangan sentimen di antara masyarakat Aceh yang membawa kebencian dan penolakan terhadap Jakarta. Laporan-laporan terhadap tindakan brutal yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI telah menanamkan rasa balas dendam di antara generasi muda Aceh. *Kedua*, melihat bahwa sebagian besar dari tentara Indonesia berasal dari suku atau etnis yang berbeda, terutama berasal dari suku Jawa, taktik brutal yang mereka pakai berimbas pada berkembangnya sentimen etnis di antara masyarakat Aceh.¹²

Secara umum, buku ini berusaha menjawab pertanyaan: “bagaimana orang aceh diluar negeri yang jumlahnya tidak seberapa banyak itu bisa sedemikian bisa berpengaruh terhadap kehidupan orang aceh yang menetap ditanah air?” untuk itulah buku ini akan mengamati kehidupan orang-orang diaspora aceh di beberapa tempat yang berbeda serta perpindahannya.¹³

Pendekatan Dalam Penulisan Buku

a. Pendekatan Etnografi

Pendekatan ini menurut para antropolog dikenal sebagai penelitian lapangan multilokasi atau etnografi transnasional (Schiller *et al.*, 1992;. Marcus, 1995; welz, 1998; Hannerz (2000); Kokot, 2002). Para

antropolog kritis telah menggugat konsep-konsep etnologi bergerak (*mobile ethnology*). Ulf Hannerz (2000), *Etnografi*-yang berarti keterlibatan mendalam dengan situasi lapangan.¹⁴ Inilah salah satu pendekatan yang digunakan oleh penulis buku, dapat dicontohkan ketika melakukan wawancara, diskusi kelompok dan obrolan informal sebagian besar menggunakan bahasa indonesia dan terkadang menggunakan bahasa inggris dengan tokoh-tokoh kunci senior, aktivis muda, imigran generasi kedua, dan diaspora biasa serta aktivis-aktivis non Aceh yang terlibat.

Disamping itu Missbach melalui pendekatan ini memberikan pernyataan “saya mengamati bahwa banyak diaspora Aceh yang menggunkan pilkada 2006 sebagai patokan untuk mengukur keamanan di Aceh”.Sebelum 2006, mereka yang skeptis menyatakan bahwa mereka ingin menunggu hasil pemilu dan memastikan apakah Aceh tetap damai. Meskipun pilkada “bebas, adil dan damai” (Clarke dan palmer, 2008:4), diasporan tetap belum mau memutuskan sikap mereka untuk pemilu 2009. Komentar-komentar seperti “MoU ini akan gagal, Aceh tidak aman. Tahun 2009 bakal panas lagi” sering terdengar dalam komunitas diaspora.¹⁵

¹²*Ibid.*, xvii.

¹³*Ibid.*,5.

¹⁴Lihat Antje Missbach, *Separatist Conflict in Indonesia the Long-Distance Politics of the Acehnese Diaspora (Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh)*, Terj. Windu Wahyudi Yusuf, (Yogyakarta: Ombak 2012), 33.

¹⁵*Ibid.*, 278.

Pernyataan di atas diperkuat oleh wawancaranya dengan Fjerritslev yang menyatakan, “ini masih teransisi. Masih belum jelas apakah nanti Aceh akan terus damai atau tidak. Indonesia sudah sering mengkhianati Aceh. Tentu saja, perdamaian itu baik, tetapi coba ingatlah CoHa (kesepakatan penghianatan permusuhan, 2002): perdamaian tidak berlangsung lama. Indonesia selalu saja bohong kepada rakyat Aceh. Pulang (ke Aceh)? tidak sekarang. Lebih baik saya tinggal di sini dulu, baru setelah itu kembali ke Aceh. Kita lihat saja pemilu 2009. Jika GAM benar-benar menang, kita akan pulang; kalau tidak, kita akan tetap disini.¹⁶

Dalam pendekatan ini Missbach juga melihat komunitas diaspora yang menyebut dirinya (*government of independent Aceh-Sumatra*, GIAS). Dimana kelompok ini tidak sepakat dengan MoU. Yang dalam pernyataannya “kami, rakyat Aceh, Sumatra, dengan ini menyatakan kepada warga dunia bahwa akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan Aceh. ini adalah perjuangan membela Negara yang berdaulat dan merdeka, yang telah diawali para pendahulu kami di tahun 1873 dan dimulai melalui deklarasi kemerdekaan Aceh pada 4 desember 1976. Nota kesepahaman Helsinki 2005, yang menempatkan Aceh di bawah penduduk Indonesi, jelas merupakan suatu

pelanggaran terhadap deklarasi kemerdekaan Aceh 4 desember 1976. Maka dari itu, kesepakatan tersebut tidak akan sah berdasarkan hukum Aceh merdeka dan tidak akan bisa diterima.¹⁷

Dengan demikian kesepakatan damai adalah momentum penting bagi keterlibatan diaspora di tanah air yang selanjutnya mengawali proses dediasporisasi. Berakhirnya konflik diiringi oleh proses pembubaran diaspora secara parsial sejak sebagian anggotanya pulang ke Aceh, menciptakan kekosongan dalam komunitas diaspora beserta strukturnya. Ketidakhadiran mereka membuat beberapa penyusuaian ulang perlu dilakukan. Meskipun kehilangan pijakan, sisa-sisa diaspora tidak mati.¹⁸ Inilah di antara beberapa contoh dalam pendekatan ini yang penulis paparkan sesuai dengan telaah dan analisis buku.

b. Pendekatan Antropologis

Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Ada dua macam Antropologi, yakni Antropologi Fisik dan Antropologi Budaya. Antropologi budaya ialah antropologi yang mempelajari kebudayaan atau Antropologi yang ruang dan lingkupnya adalah kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan adalah “keseluruhan pengetahuan manusia yang diperoleh sebagai makhluk sosial yang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, 306.

¹⁸*Ibid.*, 318

digunakan untuk memahami dan menginterpretasi pengalaman dan lingkungan, dan mendasari serta mendorong tingkah lakunya.” Koentjaraningrat, mengemukakan bahwa kebudayaan mencakup tiga aspek, yaitu: pemikiran, kelakuan dan hasil kelakuan. Kebudayaan manusia pada dasarnya adalah serangkaian aturan-aturan, kategorisasi-kategorisasi, serta nilai-nilai. Kebudayaan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga hal-hal yang ghaib, hal-hal yang buruk, bahasa, dan lain-lain. Kebudayaan meliputi unsur-unsur: (1) Sistem sosial (organisasi sosial, pendidikan); (2) Sistem bahasa dan komunikasi; (3) Sistem agama; (4) Sistem ekonomi dan teknologi; dan (5) Sistem politik dan hukum. Dalam konteksnya sebagai metodologi, Antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional, mengenai aneka warna, bahasa-bahasa dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat.¹⁹

Dengan metode ini penulis mencoba memahami kebudayaan fisik diaspora Aceh dengan bagaimana pengalaman, lingkungan dan hal yang mendorong tingkah laku orang-orang Aceh untuk ikut andil dalam diaspora. Misalnya ketika memandang jaringan pradiaspora Aceh di Malaysia yang mana

mereka membangun ikatan sesama etnis dalam jejaring diaspora.

Melihat cara kerja dari pendekatan antropologi dalam buku ini, Missbach juga memandang motivasi utama para diaspora untuk mendorong konflik di Tanah air. *Pertama*, keuntungan ekonomi, *kedua*, kewajiban moral, *ketiga*, nostalgia tanah air yang ideal. Dengan ikut memelihara konflik, elit-elit diaspora bisa bertindak sebagai wirausahawan perang serta memperoleh keuntungan finansial dari ekonomi di masa perang. Dengan mengorganisir penjualan senjata dan amunisi kepada pihak-pihak yang terlibat konflik, diaspora bisa meraup keuntungan tunai atau jatah dari perdagangan (yang biasanya illegal) sumber daya dalam tanah air.²⁰

Kemudian selain itu Missbach dalam pendekatan ini juga memandang perdamaian adalah salah satu faktor terkuat kepulangan para diaspora Aceh. Setelah MoU Helsinki. Aceh mendadak damai dan hanya segelintir saja kekacauan kecil yang terjadi (stange dan Patock, 2010). Enam bulan pertama setelah MoU, *Aceh Monitoring mission* (AMM) mengawasi proses demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi. Sebagaimana yang dituangkan dalam MoU, GAM menyerahkan total 840 pucuk senjata api dan lebih dari 18.000 pasukan keamanan non organik (pasukan yang direkrut dari luar Aceh dan

¹⁹*Ibid.*, 74.

²⁰*Ibid.*, 133.

bukan bagian dari devisi setempat) ditarik dari Aceh pada akhir 2005, selain itu hampir semua tahanan politik Aceh dibebaskan dari penjara. Ada program-program yang bertujuan membantu mantan kombatan kemabali ke masyarakat, meskipun program-program ini tidak memuaskan kebanyakan dari mereka.²¹

Begitu juga ketika Missbach memandang sebagian orang Aceh yang memilih untuk tetap tinggal di diaspora, ia menyatakan “setelah MoU, keberagaman aktivitas politik dalam diaspora pun bahkan lebih menonjol. Dorongan *sentry fugal* menguat, khususnya karena hilangnya pijakan bersama, yakni konflik di tanah air.”²²

Konsep Diaspora

Ada sejumlah alasan mengapa kata diasporan nampaknya lebih tepat untuk diterapkan untuk kasus orang aceh di luar negeri seperti Mahmud, dibanding istilah lain yang mengacu pada orang-orang yang tinggal jauh ditempat asal mereka. Sebagian besar istilah mengacu pada sebab kepergian. Seorang *Migran* (ekonomi) dengan sadar memutuskan untuk kurang lebih secara suka rela meninggalkan tanah air mereka demi mencari peluang-peluang yang lebih baik; jika menghendaki, mereka pun bisa pulang. Sementara itu, ekspatriat adalah seorang dengan latar belakang pendidikan tinggi

yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sementara waktu. Meninggalkan Tanah air bisa jadi merupakan jalan yang dipilih sendiri oleh eksil; mereka bisa juga dipaksa mengasingkan diri, namun istilah ini masih mengimplikasikan adanya tuntutan bagi mereka untuk kembali.²³

Istilah-istilah akademik lain untuk menggambarkan sekelompok orang yang berada di luar tanah air lebih menitikberatkan pada lamanya jangka waktu yang mereka rencanakan untuk tinggal: imigran bertujuan mendapatkan izin tinggal permanen di negeri penerima mereka; pencari suaka ingin tinggal selama mungkin agar selamat dari penganiyaan di Tanah air; tenaga kerja asing berencana untuk tinggal sesuai kontrak kerja mereka. Sebaliknya migran transnasional biasanya berpindah-pindah negara dan seringkali memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan/paspor.²⁴

Dalam Konteks Indonesia, ada istilah-istilah dan konsep setempat menyangkut tinggal di luar kampung halaman/Tanah air untuk sementara waktu: *merantau* dan *hijrah*. Kata kerja merantau berarti meninggalkan rumah selama jangka waktu tertentu untuk menimba pengalaman,

²³Antje Missbach, *Separatist Conflict in Indonesia the Long-Distance Politics of the Acehnese Diaspora*; Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, (Yogyakarta: Ombak), 17.

²⁴ Transnasional diartikan sebagai hubungan antaraktor nonnegara yang melintasi batas-batas negara ketimbang hubungan antar negara-bangsa (Wahlbeck, 2002; Vertovec dan Cohen 1999).

²¹*Ibid.*, 234.

²²*Ibid.*, 276.

mempelajari keahlian baru, dan mengadu nasib.²⁵

Fokus utama diaspora adalah gagasan dan kinerja kolektif. Selain itu, diaspora memungkinkan kita untuk menangkap tingginya tingkat mobilitas dan fleksibilitas dari subjek yang kita bicarakan. Orang aceh yang mengungsi ke Malaysia di tengah memuncaknya konflik tetap tinggal di dekat Aceh. Jika kondisinya memungkinkan, mereka relatif lebih mudah untuk pulang.²⁶ Argumen dalam buku ini adalah bahwa orang Aceh di luar negeri merupakan diapora, sekalipun diasporitas (sifat-sifat sebagai sebuah diaspora) tidak bisa di ukur secara kuantitas.²⁷

Sekilas Politik Jarak Jauh Aceh Sebelum Masa-Masa Konflik

Sebelum Eksodus orang aceh yang disebabkan konflik antara GAM dan militer Indonesia (1976-2005), ada tiga arus migrasi orang Aceh ke British Malaya (yang kelak menjadi Malaysia) yang juga dipicu untuk konflik. Ketiga arus ini mengakibatkan orang Aceh di luar negeri melakukan campur tangan politik dan militer ke kampung halaman mereka sendiri. *Fase pertama* emigrasi dan intervensi politik/militer disebabkan oleh perang Aceh-Belanda

²⁵ Kata *rantau* mengacu pada tanah pesisir yang landai atau delta sungai, yang dalam sejarahnya menjadi tujuan perjalanan.

²⁶ Hedman, *Nah dan Bunnel*, TP, 2005.

²⁷ *Ibid.*, 20.

(1873-1913); *fase kedua* terjadi selama dan setelah perang dunia II (1942-1949) dan *fase ketiga* terjadi selama gerakan darul Islam (1953-1962).²⁸

Perang Aceh-Belanda

Sepanjang perang Aceh melawan Belanda, banyak orang Aceh yang melarikan diri ke Penang, yang waktu itu sudah menjadi pusat perdagangan dan rumah bagi komunitas pedagang kaya asal Aceh dan para pendatang baru yang juga ikut berdagang.²⁹

Sepanjang dua dekade pertama perang, sejumlah orang Aceh di Penang punya peran politik yang signifikan dalam hal propaganda dan diplomasi. Misalnya mereka mendekati Inggris, Amerika, dan Turki agar memeberikan bantuan untuk melawan Belanda. Khususnya di tahun-tahun awal blokade pertama dan blokade di akhir dekade 1880-an yang diberlakukan Belanda, orang-orang ini berupaya menghimpun logistik untuk para pejuang di Aceh. Salah satu penyelundup senjata yang terkenal adalah Syed Mohamed Alatas, pemimpin perkumpulan rahasia muslim yang bernama Bendera Merah pada 1870-an.³⁰

Keterlibatan politik orang Aceh di negeri seberang juga terjadi selama

²⁸ *Ibid.*, 46.

²⁹ Lama sebelum pecahnya perang tersebut. Penang, sebagai pelabuhan utama di kawasan ini, telah menarik perhatian pada pedagang Aceh. Hingga kini pantai barat pulau Penang masih disebut pantai Aceh. Kini daerah tersebut dihuni khususnya oleh para penduduk desa beretnis Tionghoa.

³⁰ Rumahnya adalah salah satu dari banyak peninggalan budaya Aceh di Penang (Khoo, 1990).

pendudukan Jepang di Aceh (1942-1945), dan Perang Cumbok (1945-1946) yang meletus setelahnya. Perang ini juga sering dirujuk sebagai perang saudara atau revolusi sosial.³¹ Awalnya banyak orang Aceh yang berharap pada ekspansi Jepang. Ketika Penang dikuasai Jepang pada awal Desember 1941, orang-orang Aceh tidak hanya ikut menyebarkan propaganda pro-Jepang dari Penang ke Sumatra melalui stasion radio, tetapi juga membujuk Jepang datang ke Aceh untuk membantu mereka menyingkirkan Belanda.

Penyebaran Dispora Orang Aceh di Malaysia.

Istilah “peguyuban derita” yang dicetuskan Pnina Werbner sangat membantu menjelaskan penciptaan diaspora Aceh. Disatu sisi pengalaman orang Aceh mirip dengan apa yang telah dijelaskan Werbner menyatakan tentang migran Pakistan di Inggris; dua-duanya memproduksi “ingatan vital yang mengendap tentang penderitaan dan perlawanan bersama”. Nauja Kleist menyatakan bahwa peran narasi penderitaan lebih dari sekedar penawar untuk penghinaan yang dirasakan secara kolektif; narasi-narasi ini menjadi dasar bagi tuntutan atas pengakuan dan perlindungan. Seiring mereka

berjuang menjalani kehidupan sebagai migran ekonomi ilegal dan pengungsi yang tak dilindungi, warga Aceh juga semakin terpolitisasi. Miskin dan didera tekanan secara kolektif, orang Aceh melawan demi mempertahankan diri mereka di Malaysia.³²

Intinya pada bab ini menitikbertakan pada tiga kondisi yang menguntungkan bagi terciptanya basis persebaran diaspora Aceh di Malaysia. Pertama-tama, dengan merujuk pada tiga peristiwa bersejarah dimana orang Aceh di Malaysia telah melakukan intervensi politik di tanah air mereka secara sporadis, tradisi mencari perlindungan ke luar negeri dan memanfaatkan keamanan yang diperoleh disana untuk terjun dalam aksi politik membela tanah air. Bagian kedua pada bab ini pun menjelaskan bagaimana migran dan pengungsi baru berkontribusi himpunan besar orang Aceh di Malaysia. Dengan menyoroti gelombang baru imigrasi (yang dilakukan secara sukarela atau tidak) yang terkait dengan konflik di Aceh. Hal tersebut memperjelas bahwa konflik kekerasan di tanah air mendorong orang untuk mengungsi karena alasan-alasan politik maupun ekonomi. Meningkatnya jumlah orang Aceh di Malaysia memerlukan lebih banyak lagi struktur-struktur organisasi sekaligus menciptakan kebutuhan berjejaring yang didasari pada hubungan-hubungan etnis.³³

³¹ Nama tersebut berasal dari Teuku M. Daud Cumbok, pemimpin sejumlah *uleebalang* di Pidie, yang menginginkan Belanda kembali ke Aceh (untuk lebih jelasnya, lihat Arif, 1970), 1.

³² *Ibid.*, 85.

³³ *Ibid.*, hlm, 80.

Pembentukan Diaspora Aceh diluar Negeri

Gelombang migrasi orang Aceh ke beberapa negara Barat yang berbeda yang terjadi sejak 1990-an dan seterusnya menggambarkan bagaimana proses pembentukan yang telah dimulai di Malaysia, memasuki wilayah baru. Meskipun kondisinya berbeda di tiap Negara, para pendatang baru di Aceh-jika jumlah mereka cukup mendirikan organisasi di banyak tempat. Sejumlah pimpinan kelompok-kelompok baru ini sudah memegang posisi penting sejak di Malaysia, entah sebagai pemimpin masyarakat maupun wakil GAM. Proses pembentukan diaspora menciptakan jejaring-jejaring yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pengungsi. “Sebagai tulang punggung komunitas diaspora”.³⁴

Konsep peluang politik, sebagaimana dijelaskan Tarrow, lebih merujuk kepada dimensi-dimensi lingkungan politik yang menyediakan insentif bagi aksi kolektif. Insentif ini berkaitan dengan perkiraan banyak orang akan keberhasilan ataupun kegagalan apa yang akan mereka lakukan. Dibandingkan dengan teori mobilisasi sumber daya yang ada di luar diri (eksternal) suatu kelompok. Di dalamnya terkandung unsur-unsur yang menyangkut bagaimana sekelompok orang yang terlibat dan potensial

terlibat dalam aksi kolektif mempersepsi struktur peluang politik.³⁵

Kelompok-kelompok diaspora juga menawarkan kesepakatan kepada diasporan untuk mengidentifikasi dengan komunitas diaspora yang lebih luas hingga taraf tertentu dengan cara yang berbed-beda, mulai dari menghadiri hingga berpartisipasi aktif dalam acara-acara diaspora. Organisasi-organisasi ini punya peran melancarkan pengaruh politik ke tanah air. Sementara bagi banyak diasporan aceh, organisasi-oraganisasi ini menjadi pasak yang menopang kepentingan-kepentingan politik mereka secara kolektif.³⁶

Tren yang muncul secara keseluruhan adalah bertambahnya organisasi diaspora lokal dan jaringan transnasional antara Negara-negara tuan rumah dan tanah air, antar komunitas diaspora yang berlainan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber, hubungan kelompoknya di Denmark dan kelompok-kelompok lain di Norwegia, AS, Australia, dan Malaysia sudah terjalin sejak awal, namun “semakin menguat seiring memburuknya konflik di Aceh”.³⁷

³⁵ Lihat Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer*, Cet. 1, 2012, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunanan Kalijaga, 2012), 131.

³⁶ Lihat Antje Missbach, *Separatist Conflict in Indonesia the Long-Distance Politics of the Acehese Diaspora (Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh)*, Terj. Windu Wahyudi Yusuf, (Yogyakarta: Ombak 2012), 126.

³⁷*Ibid.*, 127.

³⁴*Ibid.*, hlm, 126.

Transformasi Sisa-Sisa Diaspora Pasca Konflik

Hal yang lebih penting dari sekedar bertanya mengapa diasporan tidak pulang setelah konflik di tanah air usai adalah mengklarifikasi bagaimana para diasporan ini menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang baru.³⁸

Penelusuran atas aktivitas-aktivitas pasca konflik yang dilakukan orang Aceh di luar negeri menunjukkan perkembangan-perkembangan berbeda yang menyebabkan hilangnya kohesi dalam diaspora yang sebelumnya kuat. Sebagian diasporan tidak hanya menarik diri dari kegiatan-kegiatan kolektif karena kecewa dengan perkembangan tanah air dan arena kosongnya kepemimpinan dalam diaspora; beberapa bahkan memilih untuk berasimilasi kedalam masyarakat di Negara penerima mereka. Terlebih penting lagi, fokus kegiatan kolektif bergeser dari politik jarak jauh ke politik identitas di Negara penerima, misalnya seperti pelestarian identitas keacehan dan kesejahteraan komunal.

Para diasporan aceh kini lebih sibuk menggelar kegiatan sosial, agama dan budaya di ruang publik maupun privat untuk memperkuat kohesi kelompok dan menciptakan corak-corak baru representasi diri. Struktur diaspora sebelumnya yang

mengutamakan politik tanah air akhirnya semakin goyah.³⁹

Sebagai komunitas terbayang (*imagined community*) yang bertumpu pada keyakinan bersama akan masa lampau dan masa depan, diaspora tidak hanya dibangun dari kesadaran saja, namun baru bisa bertahan jika diwujudkan dalam lembaga dan tindakan kolektif. Gabriel Shafer mencatat bahwa “tindakan terencana para elit diperlukan dalam pembentukan diaspora”.

Kontribusi Terhadap Pengetahuan

Berdasarkan analisa dan telaah singkat tentang buku politik diaspora Aceh ini, maka penulis dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap pengetahuan sebagai berikut:

- a. Sempat hilang dari tatanan keilmuwan. sehingga buku ini cenderung membahas mengenai peran komunitas diaspora Aceh terhadap politik yang terjadi di Aceh dan berbagai sumbangsinya terhadap rakyat Aceh.
- b. Dapat menganalisis sejauh mana perkembangan politik diaspora Aceh sampai saat ini sebagai bentuk pengkajian lebih lanjut dalam memahami konsep politik diaspora.
- c. Memberikan nilai plus terhadap praktisi pendidikan, peneliti dan

³⁸*Ibid.*, 275.

³⁹*Ibid.*, 320.

pemerhati untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai politik diasporan yang terjadi di berbagai tempat baik yang ada dalam negeri maupun diluar negeri.

- d. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya kajian politik diaspora
- e. Memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan serta dapat memobilisasi arus perkembangan kajian politik di tanah air.
- f. Memberikan gambaran sejauh mana peran serta dampak positif yang didapatkan terhadap pengetahuan mahasiswa dan para peneliti yang akan mencoba konsep ini untuk dijadikan bahan penelitian ke depan.

Kritik Penulis

Buku ini memberikan gambaran mengenai politik diaspora Aceh, dalam buku ini Antje Missbach menggunakan dua pendekatan yaitu *etnografi dan antropologi* sebagai tolak ukur dan bahan analisisnya terhadap kelompok diaspora, peran komunitas diaspora Aceh dalam menggalang dukungan masyarakat internasional, dan peran komunitas diaspora mendorong terciptanya penyelesaian secara damai. Sehingga dapat dikatakan bahwa “Antje Missbach telah berhasil mengembalikan nilai akademik (*academic value*) dari konsep

diaspora yang sempat menghilang dari kajian ilmu sosial karena seringkali secara sempit diartikan sebagai “orang-orang dipengasingan” yang tersebar di berbagai tempat akibat peperangan, konflik, bencana alam, dan upaya mencari penghidupan yang lebih layak.

Namun ada sesuatu hal yang perlu dilihat dalam pendekatan buku ini yang berdasarkan hasil diskusi sebelumnya bahwa pendekatan ekonomi politik juga perlu digunakan sebagai potret dalam memahami dan melihat kondisi ekonomi politik rakyat Aceh. Sehingga ada catatan sejarah dan kritikan sejarah dari masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan dari Republik Indonesia sendiri diakibatkan beberapa faktor yang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang salah satunya ketidakepatan pemerintah atas pembagian hasil ekspor minyak bumi dan gas alam.

Tahun 1976 *The moral economy of the peasant* ditulis James Scott untuk menerangkan tata ekonomi masyarakat peasant di Asia tenggara dan kaitannya dengan peristiwa pemberontakan yang lekat dengan sejarah kontemporer mereka.⁴⁰

kondisi ini berakibat buruk terhadap keadaan Aceh yang dimana terjadi perpecahan dari Negara Indonesia. sikap yang tidak mendukung dari pemerintah

⁴⁰ Sjafrin, dkk, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Cet. 1 Maret 2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 219.

Indonesia dulu menggambarkan bahwa rakyat aceh merasa terisolir, menderita dari Negara asal sehingga mereka lebih memilih jalan untuk keluar dari Indonesia sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan Terbentuknya komunitas GAM yang memiliki satu tujuan dan keinginan untuk merdeka, namun kondisinya tidak menguntungkan dikarenakan perlawanan timbul dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian hemat pemakalah pendekatan ekonomi politik perlu untuk dieksplorasi sebagai bahantambahan.

Simpulan

Menganalisa sejauh mana format perkembangan politik diaspora Aceh sejauh ini memberikan deskripsi terhadap pemahaman bahwasanya memang kelompok diaspora Aceh sampai saat ini masih ada, namun karena keterbatasan bantuan dari kelompok diasporan yang berada diluar negeri memberikan hasil bahwa pergerakan keolompok ini sudah tidak aktif lagi.

Memahami politik yang lebih maksimal yang berada di dalam sebuah kondisi dan perkembangan daerah, didalamnya tumbuh pengaruh pemikiran dan sikap yang agresif-intensif membuat kemungkinan kita untuk terus mengkaji lebih komprehensif atas kerentanan kaum muda terhadap pengetahuan politik dan pelaku politik. Sebagaimana secara jelas

tergambar dalam uraian-uraian di atas, ideologi, etnis dan kedekatan ternyata membuat jalinan secara fungsional dalam sebuah organisasi yang membuat gerakan-gerakan terselubung demi mengembangkan kelompok tersebut sesuai dengan arah dan tujuan.

Pelaku politik memberikan simbol yang signifikan terhadap anggota-anggotanya, untuk terus berkembang dan menata ulang sistem dan tujuan mereka dalam mengembangkan prodak-prodak pemikiran yang berjalan sesuai dengan arah dari pemimpin kepada bawahan, dengan tujuan organisasi tersebut terus berkembang dan terpelihara sesuai dengan konsep-konsep yang mereka pegang. Dapat dicontohkan ketika para diaspora Aceh memberikan peluang terhadap anggota-anggotanya untuk terus merekrut kelompok baru dan terjalin suatu hubungan kekeluargaan serta tujuan yang sama.

Dalam studi politik diasporan aceh ini memberikan analisis juga bahwa pelaku diaspora aceh memberikan kontribusi dan sumbangsih terhadap rakyat aceh yang terkena konflik di tanah Air melalui ideologi dan dukungan dana serta materi. Hal ini memberikan deskripsi bahwa sebagian orang Aceh adalah diasporan.

Hemat penulis, Mereka yang masih tetap dalam kelompok diaspora baik yang ada dalam negeri maupun diluar negeri akan tetap berharap untuk terus mempertahankan

struktur komunitas mereka demi memelihara komitmen dan sosial-budaya dalam kelompok mereka sesuai dengan yang penulis buku katakan, “mempertahankan struktur jejaring dasar mereka serta merawat mimpi tentang Aceh yang merdeka”.

Daftar Pustaka

- Arif, Abdullah. 1970. *The affairs of the Tjumbok traitors*” (Terjemahan, anotasi dan pendahuluan oleh Anthony Ried), *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, 4/5, hlm. 29-65.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Berbagai Pendekatan Dalam Metode Studi Islam*, Modul.
- Hasan Noorhaidi. 2012. *Islam Politik Di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).
- Ikhsan Darmawan. 2013. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: ALFABETA, CV
- Khoo Hock Cheng, 1959. *The trade of Penang, 1786-1823*. Singapore: University Of Malaya.
- Missbach Antje, 2012, *Separatist Conflict In Indonesia The Long Distance Politics Of The Acehese Diaspora (Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh)*, Terj, Windu Wahyudi Yusuf, (Yogyakarta: Ombak).
- M. Burhan Bungin. 2013. *Sosiologi Komunikasi; teori, paradigma, dan diskursus teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Cet. Ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Suwarno, 2012, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Ombak).
- Sairin Sjafrin, Semedi Pujo, Hidayana Bambang, 2002, *Pengantar Antropologi Ekonomi* , Cet. 1 maret, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Vertovec, Steven, dan Robin Cohen (peny.). 1999. *Migration, diasporas and transnationalism*. Cheltenham: International Library of Studies og Migration.
- Wahlbeck, Osten. 2002. “The concept of diaspora as an analytical tool in the study of refugee communities,” *Jurnal of Ethnic and Migration Studies*, 28, 2: 221-238.